



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pakar Kembali Dihadirkan dalam Sidang Uji UU Minerba

Jakarta, 8 Desember 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Selasa (8/12), pukul 11.00 WIB. Sidang akan digelar terhadap tiga permohonan dengan nomor perkara 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVIII/2020, dan 64/PUU-XVIII/2020. Namun, ahli hanya akan dihadirkan oleh Pemohon 64/PUU-XVIII/2020.

Pemohon Perkara 64 terdiri dari dua perorangan yang datang dari latar belakang profesi yang berbeda, yaitu advokat dan wiraswasta. Para Pemohon mempersoalkan Pasal 169A UU *a quo* yang secara umum mengatur perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Pemohon berpandangan bahwa norma pasal tersebut memberikan peran terlalu besar kepada Menteri dan mengesampingkan peran pemerintah daerah.

Dalam sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pemberi Keterangan DPD pada Rabu (21/10), Anggota DPD dari Kalimantan Utara Hasan Basri dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa DPD telah dilibatkan dalam penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) dan telah menyampaikan pendapatnya melalui Komite II DPD RI Bagian Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan surat DPR RI tanggal 16 Maret 2020 perihal Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba.

Kemudian, Arteria Dahlan mewakili DPR menyampaikan bahwa RUU Minerba telah disusun sejak 2015 sebagai bagian prolegnas. Arteria kemudian menyampaikan bahwa pada Juli 2018, Rapat Kerja DPR memutuskan RUU Minerba dapat dilanjutkan pembahasannya (*carry over*) terlepas dari pergantian keanggotaan dalam lembaga tersebut karena telah memasuki pembahasan dan memiliki tim penyusun. Adapun Maman Abdurrahman yang juga mewakili DPR menyampaikan keterangan berkenaan dengan kedudukan hukum setiap Pemohon.

Pada Rabu (18/11) lalu, pakar hukum tata negara Susi Dwi Harijanti yang dihadirkan oleh Pemohon Perkara 60/PUU-XVIII/2020 menanggapi keterangan DPR. Susi menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sistem *carry over* hanya dapat dilaksanakan selama RUU Minerba telah memasuki pembahasan Daftar Inventaris Masalah pada masa keanggotaan DPR Masa Jabatan 2014–2019. Sehingga, apabila hal tersebut belum dilaksanakan dan pembahasannya telah diwariskan kepada DPR Masa Jabatan 2019–2024, dapat dikatakan perubahan UU Minerba telah mengalami cacat formal karena tidak memenuhi syarat prioritas *carry over* oleh DPR masa jabatan sebelumnya. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)